

**LEGALITAS SETYA NOVANTO SEBAGAI WARGA
NEGARA INDONESIA BERSTATUS ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM
JUDICIAL REVIEW
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 20/PUU - XIV/2016**

SKRIPSI

**Oleh:
Saiful Anam
201410115188**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Legalitas Setya Novanto Sebagai Warga Negara Indonesia Berstatus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Judicial Review Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU - XIV/2016

Nama : Saiful Anam

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115188

Program Studi / Fakultas : IlmuHukum / Hukum

MENYETUJUI,

Dekan,



DR. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.

NIP. 010803017

Pembimbing I

Pembimbing II



Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SHI.,MH.

NIP. 011606048



Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH.

NIP. 0116066051

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Legalitas Setya Novanto Sebagai Warga Negara Indonesia Berstatus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Judicial Review Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU - XIV/2016

Nama : Saiful Anam

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115188

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juli 2018

Bekasi, 19 Juli 2018



Pembimbing I

Pembimbing II

Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SHI.,MH.

NIP. 011606048

Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH.

NIP. 0116066051

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Legalitas Setya Novanto Sebagai Warga Negara Indonesia Berstatus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Judicial Review Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU - XIV/2016

Nama : Saiful Anam

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115188

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Ujian Skripsi : 19 Juli 2018

Bekasi, 19 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Herybertus Soekartono, SH., MH.....

NIP. 019909008

Penguji I : Adi Nur Rohman, SHI., MH.....

NIP. 011507040

Penguji II : Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH.....

NIP. 011606051

MENGETAHUI

Ketua Program Studi

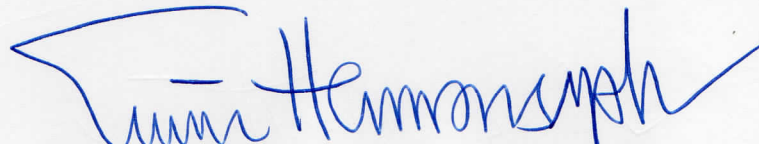
Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum


Elfirda Ade Putri, SH., MH.

NIP. 011512043


DR. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.

NIP. 010803017

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul:

“Legalitas Setya Novanto Sebagai Warga Negara Indonesia Berstatus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Judicial Review Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU - XIV/2016”

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.


Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikan melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 19 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan,




Saiful Anam

201410115188

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Saiful Anam
NPM : 201410115188
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hak bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Legalitas Setya Novanto Sebagai Warga Negara Indonesia Berstatus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Judicial Review Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU - XIV/2016

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mangalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*data Base*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu untuk meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 19 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,

Legalitas Setya..., Saiful, Fakultas Hukum 2018



Saiful Anam

ABSTRAK

Saiful Anam, 201410115216, Skripsi, Legalitas Setya Novanto Sebagai Warga Negara Indonesia Berstatus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam *Judicial Review* Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU - XIV/2016. Setya Novanto Sebagai Warga Negara Indonesia Berstatus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merasa dirugikan atas berlakunya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan yang mengabulkan *Legal Standing* anggota Dewan Perwakilan Rakyat berbeda dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 berpendirian bahwa pengertian “perorangan warga negara Indonesia” dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak sama dengan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 menyatakan kedudukan/jabatan Pemohon sebagai anggota DPR, menurut Mahkamah Konstitusi, pada diri Pemohon juga melekat hak-hak konstitusional yang membedakan Pemohon dengan warga negara Indonesia yang lain. Dalam skripsi ini penulis membahas legalitas atau legal anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan menganalisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU - XIV/2016, dengan Drs. Setya Novanto (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai Pemohon *Judicial Review*. Penelitian ini bertujuan memberikan saran untuk menumbuhkan konsep-konsep ilmiah bagi perkembangan pengetahuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah beberapa undang-undang dan peraturan hukum. Dari hasil penelitian tersebut, masih ditemukan kekosongan hukum karena aturan hukumnya belum spesifik... Hal ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pembaharuan hukum positif yang mengatur secara lebih sempurna syarat dan kode etik pemohon *Judicial Review*.

Kata kunci: Legalitas, *Judicial Review*, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Pembimbing:

Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SHL., MH.

Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH.

ABSTRACT

Saiful Anam, 201410115216, Skripsi, Legality of Setya Novanto as an Indonesian Citizen in the status of Members of the House of Representatives in Judicial Review of Case Studies of the Constitutional Court Decision Number 20 / PUU-XIV/2016.

Setya Novanto As an Indonesian Citizen in the status of member of the People's Legislative Assembly who feels aggrieved over the coming into effect of Article Article paragraph (1) and paragraph (2) and Article 44 sub-paragraph b of Law Number 11 Year 2011 on Information and Electronic Transactions and Article 26A Undang- Law Number 31 Year 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. The decision to grant Legal Standing a member of the People's Legislative Assembly is different from the previous Constitutional Court rulings. Constitutional Court Decision Number 20 / PUU-V / 2007 argues that the definition of "individual Indonesian citizens" in Article 51 paragraph (1) letter a of the Law of the Constitutional Court is not the same as an Indonesian citizen who is a member of the People's Legislative Assembly. Constitutional Court Decision Number 151 / PUU-VII / 2009 states that the position / position of the Petitioner as a member of the House of Representatives, according to the Constitutional Court, the Petitioners themselves also have constitutional rights that distinguish the Petitioner from other Indonesian citizens. In this thesis the author discusses the legality or legal members of the House of Representatives by analyzing the Decision of the Constitutional Court Number 20 / PUU - XIV / 2016, with Drs. Setya Novanto (Member of the House of Representatives) as an Appellant for Judicial Review. This study aims to provide advice to foster scientific concepts for the development of legal knowledge. This study uses normative legal research methods by examining several laws and legal regulations. From the results of the study, there is still a legal vacuum because the legal rules have not been specific ... This is expected to be a consideration for the government in the renewal of a positive law that regulates more perfectly the terms and ethical code of the applicant Judicial Review.

Keywords: Legality, Judicial Review, Member of House of Representatives

Advisor:

Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SHL., MH.

Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH.

KATAPENGANTAR

Rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam penulis hayati kepada Tuhan semesta alam atas nikmat pengetahuan dan keluasan pemikiran yang telah tcurahkan. Liputan kasih sayang untuk keluarga dan kawan-kawan perjuangan yang konsisten dan baik hati mendukung perjuangan kerakyatan. Luapan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses mengembangkan diri dan menjaga semangat belajar dan sayang kawan.

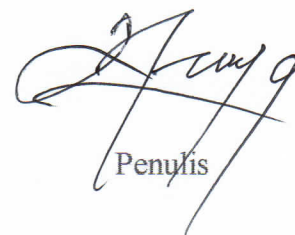
Ucapan terima kasih dan doa penuh kasih sayang penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. (c) Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Bapak DR. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Bapak Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SHI.,MH. selaku Dosen Pembimbing;
4. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing;
5. Seluruh Dosen Pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
6. Kawan-kawan perjuangan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sehingga tanggung jawab kepada pemikiran akan terus berkembang. Penulis meminta maaf apabila ada kesalahan di dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih,

Bekasi, 18 Juni 2018


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
MOTTO	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	4
1.2.1 Identifikasi Masalah	4
1.2.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	5
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	5
1.4.1 Kerangka Teoritis	5
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	6
1.4.3 Kerangka Pemikiran	8
1.5 Metode Penelitian.....	9

1.6	Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		12
2.1	Tinjauan Umum Tentang Landasan Teori	12
2.1.1	Teori Konstitusi	12
2.1.2	Teori Pembagian Kekuasaan	18
2.1.3	Teori Pertanggungjawaban.....	23
BAB III HASIL PENELITIAN		32
3.1	Kasus Posisi.....	32
3.2	Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah.....	45
3.3	Pendapat Berbeda (<i>Dissenting Opinions</i>).....	54
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN...		62
4.1	Pembahasan Dan Analisis Penelitian Mengenai Posisi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bilamana Sebagai Warga Negara Dalam Melakukan Uji Materi Atas Suatu Undang-Undang.....	60
4.2	Pembahasan Dan Analisis Penelitian Adanya Pendapat Berbeda Mengenai Permohonan Uji Materi Dari Dewan Perwakilan Rakyat Yang Satu Sisi Tidak Dikabulkan Dan Disisi Lain Dikabulkan Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi.....	75
BAB V PENUTUP		97
5.1	Kesimpulan	97
5.1.1	Kedudukan Hukum/ <i>Legal Standing</i> Setya Novanto Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.....	92
5.1.2	Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.....	93
5.2	Saran	94
5.2.1	Saran untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



MOTTO;
HIDUP ADALAH TANGGUNG JAWAB
KEPADA PIKIRAN



DAFTAR SINGKATAN

HAM	Hak Asasi Manusia
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
DPR-RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
KAM	Kewajiban Hak Asasi Manusia



LAMPIRAN

Lampiran I	Lembar Konsultasi Pembimbing I
Lampiran II	Lembar Konsultasi Pembimbing II
Lampiran III	Surat Keterangan Riset
Lampiran IV	Putusan Pengadilan
Lampiran V	Riwayat Hidup Penulis

